

Peran Akuntansi Hijau dalam Keberlanjutan Perusahaan di Indonesia

The Role of Green Accounting in Corporate Sustainability in Indonesia

Ade Gunawan^{1*}, Achmad Tubagus Surur², Muhammad Nasrullah³, Adinda Umul Fadzila⁴

- ¹ Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia
² Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia
³ Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia
⁴ Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: This research explores the role of green accounting in supporting the sustainability of companies in Indonesia, focusing on how this practice helps businesses align with environmental regulations and contribute to long-term sustainability. **Background Problems:** As environmental concerns grow globally, businesses are under increasing pressure to adopt sustainable practices. However, challenges remain in accurately measuring environmental costs and benefits and ensuring consistent regulatory enforcement. **Novelty:** This study examines the integration of green accounting practices in Indonesia, identifying regulatory influences, the barriers companies face, and the benefits that adopting green accounting brings to corporate sustainability. **Research Methods:** The research employs a systematic literature review (SLR), analyzing relevant articles published between 2019 and 2024. The study synthesizes findings from selected articles to understand how green accounting is applied in Indonesia and its role in promoting corporate sustainability. **Finding/Results:** The findings suggest that while green accounting is becoming more prevalent, significant barriers remain, particularly in measuring environmental impacts. Companies that adopt green accounting practices demonstrate better relationships with stakeholders and greater competitiveness. **Conclusion:** Green accounting is vital for enhancing the sustainability of companies in Indonesia. However, more consistent regulatory enforcement and the improvement of measurement techniques are needed to maximize its potential. Companies benefit from adopting green accounting through improved reputation, stakeholder trust, and competitive advantages.

Keywords:

ARTICLE INFO

Article information:
Received: 01 March 2025
Revised: 25 April 2025
Accepted: 11 June 2025

ISSN:
2775-6270 (P-ISSN)
2775-8443 (E-ISSN)

DOI:
<https://doi.org/10.28918/jaais.v6i1.10334>

Green accounting, Sustainability, Corporate Responsibility,
Environmental impact

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini mengkaji peran akuntansi hijau dalam mendukung keberlanjutan perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana praktik ini membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. **Latar Belakang Masalah:** Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan global, perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Namun, tantangan utama terletak pada pengukuran biaya dan manfaat lingkungan yang akurat serta penegakan regulasi yang konsisten. **Kebaruan:** Penelitian ini mengeksplorasi penerapan praktik akuntansi hijau di Indonesia, mengidentifikasi pengaruh regulasi, hambatan yang dihadapi perusahaan, dan manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengadopsi akuntansi hijau dalam mendukung keberlanjutan. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR), dengan menganalisis artikel-artikel relevan yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Penelitian ini menyintesis temuan dari artikel yang dipilih untuk memahami bagaimana akuntansi hijau diterapkan di Indonesia dan perannya dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuntansi hijau semakin diterapkan, masih ada hambatan besar, terutama dalam pengukuran dampak lingkungan yang akurat. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau menunjukkan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan dan memiliki daya saing yang lebih besar. **Kesimpulan:** Akuntansi hijau sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Namun, penegakan regulasi yang lebih konsisten dan peningkatan teknik pengukuran diperlukan untuk memaksimalkan potensinya. Perusahaan yang mengadopsi akuntansi hijau mendapatkan manfaat berupa reputasi yang lebih baik, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keuntungan kompetitif.

Kata kunci: Akuntansi hijau, Keberlanjutan, Tanggung jawab perusahaan, Dampak lingkungan,

*E-mail address: ade.gunawan@uingusdur.ac.id, achmad.tubagus.surur@uingusdur.ac.id,
muhhammad.nasrullah@uingusdur.ac.id, adinda.umul.fadzila@mhs.uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 20 dekade terakhir ini, perhatian terhadap isu lingkungan hidup semakin meningkat dan tekanan terhadap dunia usaha untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan hidup semakin meningkat (Al-Dhaimesh, 2020). Dunia usaha dituntut untuk menerapkan perusahaan yang ramah lingkungan, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan menerapkan praktik manajemen berbasis hijau (green management practices), yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya atas aktivitas perusahaan dan lingkungan hidup, yang mana biaya-biaya lingkungan

hidup tersebut akan digunakan saat manajemen mengambil keputusan bisnis dan akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Penerapan praktik akuntansi hijau sebagai bagian manajemen berbasis hijau diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, sehingga dapat menimbulkan respon positif dari masyarakat sehingga dapat menumbuhkan loyalitas investor. Dalam konteks pelaporan, praktik akuntansi hijau tercermin dari Sustainability Reporting (SR) yang berfokus pada upaya perusahaan dalam mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi serta upaya untuk meningkatkan kinerja positif (Yulyan, dkk, 2024). Di sisi lain, telah terbentuk kesepakatan internasional untuk menjaga lingkungan hidup, seperti yang tertuang dalam Protokol Kyoto, yaitu kesepakatan yang dibentuk pada tahun 1997 dalam United Nations Framework Convention on Climate Change. Kesepakatan internasional yang berlaku sejak tahun 2005 dan merupakan komitmen dari 166 negara, termasuk Asia Tenggara, ini merupakan pernyataan bersama setiap negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Darlis, 2024).

Kawasan Asia Tenggara diperkirakan telah terkena dampak buruk perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir. Menurut temuan yang disajikan dalam *The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review*, yang diterbitkan oleh Asian Development Bank pada tahun 2009, empat negara Asia Tenggara—Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam—mengalami konsekuensi negatif dari perubahan iklim (Ali Ahzar, 2018). Lebih dari 50 persen populasi dunia tinggal di benua ini, yang harus memikul sebagian tanggung jawab atas dampak perubahan iklim. Sajikan indeks kinerja lingkungan untuk negara-negara Asia Tenggara, dengan memberikan skor yang bervariasi untuk indeks polusi (Sibuea et al., 2021).

Penerapan praktik akuntansi hijau sangat penting untuk menjaga dan mempromosikan kesadaran lingkungan (Sukmadilaga et al., 2023). Di Indonesia, penerapan akuntansi hijau menjadi semakin penting, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan dan tuntutan regulasi yang semakin ketat. Melalui akuntansi hijau, perusahaan dapat mencatat dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka, termasuk penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan emisi gas rumah kaca. Tidak hanya itu, akuntansi hijau juga berperan dalam membantu perusahaan untuk mengalokasikan biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan secara lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki citra mereka di mata publik.

Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, semakin mendukung penerapan akuntansi hijau dengan mewajibkan perusahaan untuk menilai dan melaporkan dampak lingkungan dari setiap proyek yang mereka jalankan. Selain itu, program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan mereka melalui pengungkapan informasi yang lebih transparan.

Meskipun demikian, penerapan akuntansi hijau di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penegakan regulasi dan kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat lingkungan secara akurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan akuntansi hijau di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, serta mengevaluasi peranannya dalam mendukung keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan praktik akuntansi hijau dan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam operasional mereka.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Lingkungan Jepang (EAGJ) 2005, akuntansi hijau merupakan suatu struktur yang secara sistematis digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan biaya konservasi atau pelestarian lingkungan serta mengukur manfaat ekonomi dari dilakukannya konservasi lingkungan. Oleh karena itu, sudah tepat jika perusahaan menggunakan konsep akuntansi hijau karena dianggap lebih mendasar dalam memberikan EVA (Ashari dan Anggoro, 2021).

Beberapa penelitian telah menggunakan teori legitimasi untuk menguji praktik pengungkapan hijau dan sosial di antara perusahaan. Penekanan pada teori legitimasi adalah bahwa adanya dukungan dari masyarakat berperan penting dalam keberlanjutan, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan citra perusahaan. Teori legitimasi menurut Kent & Zunker (2013) dalam (Aulia, 2023) menyatakan bahwa organisasi secara terus menerus berusaha meyakinkan publik bahwa mereka menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan norma masyarakat. Dalam teori ini, perusahaan perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan telah dijalankan berdasarkan norma atau aturan yang ada di masyarakat sehingga Perusahaan akan terus berupaya keras untuk mendapatkan legitimasi stakeholder, salah satunya dengan melakukan pengungkapan. Strategi perusahaan untuk membangun citra positif bahwa perusahaan peduli terhadap isu sosial dan lingkungan adalah dengan meningkatkan komunikasi dengan stakeholder dengan mengungkapkan informasi tambahan seperti laporan keberlanjutan sehingga perusahaan dapat memperoleh legitimasi stakeholder.

Akuntansi Hijau

Akuntansi Hijau merupakan akuntansi yang menghitung dan menanggung biaya pencegahan maupun yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat (Hamidi, 2019). Menurut Lako (2018) Akuntansi Hijau merupakan suatu proses terpadu dalam mengenali, mengukur nilai, mencatat, meringkas, melaporkan dan mengungkapkan objek, transaksi atau peristiwa keuangan, sosial dan lingkungan secara lengkap, terpadu dan relevan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan manajemen ekonomi maupun non ekonomi.

Akuntansi Hijau menurut Cohen (2011) dalam Indriastuti & Riansyah (2024) juga dikenal sebagai akuntansi lingkungan, adalah konsep akuntansi yang menghubungkan atau mencakup biaya atau anggaran lingkungan dalam aktivitas perusahaan. Akuntansi Hijau mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas perusahaan yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat. Akuntansi Hijau bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen lingkungan dengan menilai aktivitas lingkungan dari perspektif biaya (biaya lingkungan) dan manfaat atau dampak (manfaat ekonomi). Berbagai perusahaan menerapkan Akuntansi Hijau untuk menghasilkan penilaian kuantitatif terhadap biaya dan dampak dari perlindungan lingkungan.

Akuntansi hijau mengacu pada bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang mendukung bagaimana penilaian kinerja lingkungan bekerja. Kinerja lingkungan adalah bagaimana ia membentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (Traxler et al., 2020). Istilah "akuntansi hijau" mengacu pada subbidang baru pembukuan yang berkaitan dengan identifikasi, kategorisasi, pengukuran, perhitungan, estimasi, pencatatan, dan pengungkapan

informasi tentang lingkungan. Informasi tentang lingkungan yang berguna untuk membuat keputusan bisnis dikumpulkan dan disebarluaskan melalui disiplin akuntansi lingkungan (Sebastian, 2022). Indriastuti, Maya & Riansyah, Andi. (2024)

Akuntansi hijau, juga disebut sebagai akuntansi lingkungan, bertujuan untuk mengukur dan melaporkan biaya ekonomi dari degradasi lingkungan dan manfaat dari penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Akuntansi hijau bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja keuangan perusahaan dengan memasukkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan (Feng, 2024).
Komponen Akuntansi Hijau:

1. Biaya Lingkungan: Meliputi biaya yang terkait dengan pengendalian polusi, konservasi sumber daya, dan pemulihan ekologi.
2. Akuntansi Sumber Daya Alam: Mengukur nilai sumber daya alam, dengan mempertimbangkan penipisan dan degradasi.
3. Kewajiban Lingkungan: Mengakui kewajiban masa depan yang terkait dengan kerusakan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan Systematic Literature Review (SLR). Peneliti ingin menjelaskan dan menjabarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan peran serta penerapan akuntansi hijau dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Langkah-langkah rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Artikel Relevan: Peneliti memulai dengan mencari artikel yang berkaitan dengan topik akuntansi hijau. Pencarian ini dilakukan melalui platform seperti Google Scholar dan Scopus, menggunakan kata kunci seperti "akuntansi hijau" dan "akuntansi lingkungan". Peneliti membatasi artikel yang dipilih pada publikasi yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024.
2. Seleksi dan Penyaringan Artikel: Dari pencarian awal, peneliti menemukan 42 artikel yang relevan dengan tema akuntansi hijau. Kemudian, peneliti melakukan seleksi lebih lanjut dan memilih 16 artikel yang paling relevan dan berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.
3. Analisis Mendalam: Setelah artikel-artikel tersebut dipilih, peneliti mempelajarinya secara mendetail untuk mengidentifikasi penerapan akuntansi hijau di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, serta peranannya dalam mendukung keberlanjutan. Dari 16 artikel yang terpilih, hanya 7 artikel yang dianggap paling relevan dan mendalam untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Sintesis Temuan: Peneliti kemudian menyusun sintesis dari temuan-temuan yang diperoleh dari artikel yang telah dianalisis. Hasil dari tinjauan pustaka ini memberikan gambaran mengenai perkembangan akuntansi hijau di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Regulasi Akuntansi Hijau di Indonesia

Perkembangan akuntansi hijau di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, perkembangan ini didorong oleh kebijakan pemerintah, perhatian dari sektor bisnis, serta

kebutuhan akan pelaporan yang lebih transparan terkait dampak lingkungan. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan peraturan yang mendukung keberlanjutan, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) dan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang mengharuskan perusahaan untuk menilai dampak lingkungan dari proyek mereka (Maya, 2024).

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mulai memperkenalkan berbagai regulasi yang mendorong perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan mereka. Pemerintah mendukung penerapan akuntansi hijau dengan program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau yang disebut PROPER. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini diharapkan dapat mendorong penataan kembali pengelolaan lingkungan Perusahaan. Penerapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan lingkungan perusahaan, termasuk pengelolaan limbah (Hamidi, 2019).

Maya, dkk. (2024) menjabarkan bahwa Regulasi mengenai ESG di Indonesia diawali dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang kewajiban melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di sektor sumber daya alam. Setelah Undang-Undang tersebut disahkan DPR pada bulan Juli 2007, banyak perusahaan mulai peduli dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) baik secara wajib maupun sukarela. Banyak perusahaan publik dan swasta mulai berkomitmen untuk melaksanakan TJSL dan CSR secara berkelanjutan dan melaporkan informasinya dalam Laporan Tahunan Direksi. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. TJSL dan CSR bahkan menjadi kebutuhan inti perusahaan karena terkait dengan hubungan stakeholder dan investasi strategis bagi perusahaan (Lako, 2018). Banyak pula perusahaan yang menjadikan TJSL dan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Regulasi lain yang relevan adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Meskipun belum secara eksplisit diwajibkan dalam hal pelaporan akuntansi hijau, regulasi ini membuka jalan untuk integrasi antara laporan keuangan dan laporan lingkungan. Beberapa perusahaan di sektor industri, seperti pertambangan, energi, dan manufaktur, telah mulai menerapkan akuntansi hijau dalam pelaporan keuangan mereka. Mereka mengklasifikasikan biaya dan pendapatan yang terkait dengan aspek lingkungan, seperti biaya mitigasi polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan program pengurangan karbon. Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mulai melaporkan kegiatan CSR mereka yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Laporan keberlanjutan ini juga sering kali melibatkan faktor-faktor seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/POJK.03/2017 mengenai laporan keberlanjutan menjadi dasar regulasi kedua dalam penerapan ESG di Indonesia. Berdasarkan regulasi tersebut, Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan. Penerapan keuangan berkelanjutan diawali dengan penyusunan rencana aksi keuangan, pelaksanaan rencana tersebut, dan penyampaiannya kepada pemegang saham. Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015-2019 dan 2021-2025. Di sektor perbankan, OJK juga secara khusus telah menerbitkan Pedoman Teknis bagi Bank terkait

penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Selanjutnya, Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan. Artinya, perusahaan yang menerapkan konsep keberlanjutan cenderung mengungkapkannya sehingga memperlihatkan tindakan yang dilakukannya. Pengungkapan tersebut menjadi dasar pengukuran skor ESG (Maya, dkk., 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 telah memberikan penjelasan mengenai informasi minimal yang wajib dimuat dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan wajib menjelaskan strategi keberlanjutan yang diterapkan. Selain itu, perusahaan wajib mengungkapkan kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir terhadap aspek keberlanjutan yang meliputi aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Perusahaan juga wajib mengungkapkan tata kelola keberlanjutan. Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur mengenai isi pelaporan keberlanjutan yang wajib dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan wajib mematuinya secara komprehensif. Laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan menjadi dasar penetapan skor ESG oleh lembaga pemeringkat. Selain itu, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 memberikan panduan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan tahunan bagi emiten, termasuk memuat pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia mengungkapkan aspek ESG paling banyak dalam laporan tersebut dibandingkan dengan aspek lainnya (Maya, dkk., 2024).

Peran Akuntansi Hijau terhadap Keberlanjutan Perusahaan di Indonesia

Perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan internasional, seperti yang digariskan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Banyak perusahaan besar di Indonesia yang mengintegrasikan standar GRI dalam laporan tahunan mereka. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi hijau, karena perusahaan harus melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari operasional mereka secara lebih transparan. Menurut Adula, Harif., P, Natasha (2024) perusahaan yang menerapkan keberlanjutan dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing, menarik basis pelanggan yang lebih luas, dan beradaptasi lebih mudah terhadap dinamika pasar yang berubah. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu mengenai peranan akuntansi hijau terhadap keberlanjutan perusahaan:

Penulis	Hasil
Endiana,et.al. (2020)	Perusahaan manufaktur di Indonesia mampu menerapkan akuntansi hijau dengan mengalokasikan biaya lingkungan yang tepat dan sesuai dengan porsinya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat menilai bahwa perusahaan yang memiliki peringkat baik dalam program pemeringkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memiliki prospek kinerja keuangan yang baik. Perusahaan ini diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan perencanaan serta alokasi biaya lingkungan dalam proses produksinya.
Chairia (2022)	Akuntansi lingkungan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengukur nilai eksternalitas biaya dan manfaat yang timbul dari industri proses seperti adanya pencemaran udara, limbah cair, kebocoran tabung

	amoniak, kebocoran tabung nuklir atau eksternalitas lainnya.
May, dkk. (2023)	Pengungkapan praktik akuntansi hijau pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga pembentukan regulasi dan kebijakan terkait akuntansi hijau dianggap penting dalam menyediakan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk mengartikulasikan kinerja keberlanjutan mereka dan mengukur dampak lingkungan mereka secara akurat. Regulasi ini berfungsi sebagai katalis bagi perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengungkapkan praktik akuntansi hijau secara konsisten, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan.
Meilda, dkk. (2023)	Penerapan akuntansi hijau dan kinerja lingkungan secara signifikan memengaruhi pembangunan berkelanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Akuntansi hijau sebagai konsekuensinya memengaruhi pembangunan berkelanjutan, yang komponen-komponennya dievaluasi oleh biaya lingkungan, biaya daur ulang produk, biaya pengembangan, dan penelitian lingkungan dalam laporan tahunan. Kinerja lingkungan, yang ditentukan dengan memiliki sertifikat lingkungan ISO 14001, PROPER, dan ISPO/MSPO, juga merupakan faktor dalam pembangunan berkelanjutan. Peningkatan penghargaan untuk sertifikat lingkungan perusahaan yang membuktikan kinerja lingkungan yang baik akan berdampak pada peningkatan pembangunan berkelanjutan di perusahaan kelapa sawit di Indonesia.
Sembiring, dkk. (2023)	Perusahaan yang hanya bertujuan untuk meningkatkan laba akan mempertimbangkan setiap biaya yang dibebankan, termasuk untuk aktivitas lingkungan yang dianggap dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Sehingga manajemen lebih tertarik untuk berfokus pada pengungkapan informasi keuangan daripada mengungkapkan aktivitas lingkungan perusahaan. Pengungkapan aktivitas lingkungan diimplementasikan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, yang secara tidak langsung memberikan citra yang baik untuk pengungkapan aktivitas lingkungan karena masyarakat menilai perusahaan peduli terhadap lingkungan. Penerapan akuntansi hijau melalui penerapan kegiatan berwawasan lingkungan, menghasilkan produk ramah lingkungan yang dikonsumsi masyarakat, serta memperoleh peringkat PROPER memerlukan alokasi biaya lingkungan. Adanya biaya lingkungan akan menarik minat investor karena perusahaan dianggap peduli terhadap lingkungan.
(Maya, dkk., 2024)	Dari 902 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hanya 79 perusahaan yang memiliki informasi

skor ESG per 31 Desember 2023. Artinya, baru 8,76% perusahaan yang mengimplementasikan ketentuan ESG di Indonesia. Skor ESG dari 79 perusahaan tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki risiko ESG sedang hingga berat. Skor ESG menunjukkan bagaimana risiko perusahaan berdampak terhadap lingkungan, masyarakat, pemegang saham, dan tata kelola perusahaan itu sendiri. Sejalan dengan teori pemangku kepentingan, praktik ESG penting untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sehingga skor ESG mampu menunjukkan kinerja perusahaan, tetapi skor ESG menjadi lebih penting ketika investor menganalisis potensi investasinya di masa mendatang sehingga tidak dapat diabaikan oleh perusahaan.

Darlis, dkk. (2024)

Akuntansi hijau tidak memberikan dampak substansial terhadap nilai perusahaan karena tidak adanya peraturan wajib yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan, seperti akuntansi hijau, bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, adopsi praktik akuntansi hijau oleh perusahaan murni bersifat simbolis, yang dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan peraturan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan peraturan mengenai kebijakan pengungkapan lingkungan untuk memastikan efektivitasnya.

Berikut ini adalah manfaat penerapan akuntansi hijau pada perusahaan di Indonesia:

1. Meningkatkan Transparansi Lingkungan

Akuntansi hijau membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasional mereka, seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan mengintegrasikan informasi ini dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan, perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kontribusi mereka terhadap keberlanjutan. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholder (misalnya, konsumen, investor, dan masyarakat).

2. Mengidentifikasi Biaya Lingkungan

Salah satu peran utama akuntansi hijau adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Misalnya, biaya untuk mengurangi polusi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air dan energi. Dengan mengidentifikasi biaya ini secara jelas, perusahaan dapat mengelola dan merencanakan anggaran dengan lebih efisien. Ini juga mendorong perusahaan untuk mengurangi biaya lingkungan melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga mengoptimalkan keberlanjutan finansial mereka.

3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Dengan memanfaatkan akuntansi hijau, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal investasi berkelanjutan, pengelolaan risiko lingkungan, dan strategi operasional. Misalnya, dengan menganalisis dampak lingkungan dari setiap aspek produksi, perusahaan dapat memilih untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan atau memilih

bahan baku yang lebih berkelanjutan. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien.

4. Meningkatkan Reputasi Perusahaan

Dalam era di mana konsumen dan investor semakin sadar akan isu-isu lingkungan, penerapan akuntansi hijau dapat membantu perusahaan memperkuat citra mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Banyak perusahaan yang berhasil menarik pelanggan dan investor dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Akuntansi hijau menyediakan data yang dapat digunakan untuk memperkuat klaim-klaim ini dalam laporan keberlanjutan mereka.

5. Mematuhi Regulasi dan Mengurangi Risiko Hukum

Pemerintah Indonesia semakin memperkenalkan regulasi terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, seperti yang terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan undang-undang pengelolaan limbah. Akuntansi hijau membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi-regulasi tersebut dengan lebih baik, mengurangi risiko hukum terkait pelanggaran lingkungan, dan menghindari potensi denda atau sanksi. Selain itu, akuntansi hijau juga membantu dalam mempersiapkan laporan yang diperlukan oleh regulator terkait dengan keberlanjutan dan dampak lingkungan.

6. Meningkatkan Daya Saing Perusahaan

Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam laporan keuangan, perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan regulator tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan lebih cenderung menarik perhatian investor dan pelanggan yang berorientasi pada keberlanjutan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia sudah menerapkan akuntansi hijau untuk memenuhi standar internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

7. Memperkenalkan Inovasi dan Efisiensi

Akuntansi hijau mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dalam merancang proses bisnis yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dengan menganalisis data terkait konsumsi energi atau penggunaan bahan baku, perusahaan dapat menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan mengurangi jejak karbon mereka. Ini juga mendukung penciptaan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan, yang semakin dicari oleh konsumen.

8. Mendukung Penerapan Prinsip Ekonomi Sirkular

Salah satu konsep penting dalam keberlanjutan adalah ekonomi sirkular, yaitu pendekatan di mana produk, bahan, dan sumber daya terus digunakan dan diproses dalam siklus tertutup. Akuntansi hijau dapat mendukung penerapan ekonomi sirkular dengan mencatat dan melaporkan siklus hidup produk dan sumber daya, serta mengidentifikasi peluang untuk mendaur ulang, memperpanjang umur produk, dan mengurangi limbah.

9. Meningkatkan Keterlibatan Stakeholder

Akuntansi hijau dapat menjadi alat untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai stakeholder, seperti masyarakat, pemerintah, dan kelompok lingkungan. Dengan melibatkan stakeholder dalam proses pelaporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Ini juga memberi mereka

kesempatan untuk mendengarkan umpan balik dari stakeholder yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka.

10. Mempersiapkan Masa Depan

Perusahaan yang mengintegrasikan akuntansi hijau dalam operasional mereka cenderung lebih siap menghadapi perubahan-perubahan besar di masa depan, seperti perubahan iklim, ketatnya regulasi lingkungan, dan perubahan preferensi pasar terhadap produk yang ramah lingkungan. Akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola risiko-risiko lingkungan yang mungkin muncul di masa depan, sekaligus membuka peluang baru dalam pasar yang semakin berfokus pada keberlanjutan.

Penelitian ini berfokus pada analisis penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan akuntansi hijau dalam mendukung keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Dalam konteks teori legitimasi yaitu bagaimana organisasi berusaha mendapatkan dan mempertahankan pengakuan atau penerimaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan melalui aktivitas yang dianggap sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial. Perusahaan yang mengimplementasikan akuntansi hijau secara transparan mengungkapkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Hal ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap isu sosial dan lingkungan, yang dapat meningkatkan legitimasi mereka di mata publik dan pemangku kepentingan.

Menurut teori legitimasi, perusahaan akan berusaha memperoleh dan mempertahankan legitimasi dengan melakukan pengungkapan terkait keberlanjutan, yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Akuntansi hijau, yang mengintegrasikan biaya lingkungan dalam laporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan, menjadi salah satu alat perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi norma-norma masyarakat terkait keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pengungkapan ini tidak hanya membantu perusahaan memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga memperbaiki citra perusahaan di mata investor dan konsumen, yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi hijau merupakan alat penting untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Akuntansi hijau membantu perusahaan dalam mengintegrasikan biaya lingkungan dalam praktik keuangan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Meskipun semakin banyak diterapkan, tantangan masih ada, terutama dalam pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan yang akurat. Regulasi memainkan peran penting dalam membentuk praktik akuntansi hijau, dan meskipun ada kemajuan, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penegakan regulasi yang konsisten dan mendukung perusahaan dalam upaya keberlanjutan mereka.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengandalkan artikel dan literatur yang ada dalam periode terbatas (2019-2024). Dengan demikian, penelitian ini mungkin tidak mencakup studi yang lebih lama yang bisa saja memberikan wawasan yang berbeda atau lebih luas tentang topik ini. Selain itu, penelitian ini lebih terfokus pada penerapan akuntansi hijau di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan di negara lain dengan kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi yang berbeda. Penerapan konsep akuntansi hijau di negara-negara lain, terutama yang berada di kawasan ASEAN, dapat memberikan gambaran yang berbeda, tergantung pada konteks lokal masing-masing.

Saran bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data langsung dari perusahaan yang telah mengimplementasikan akuntansi hijau. Melalui wawancara atau survei dengan praktisi dan manajer yang terlibat langsung, peneliti dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi dan solusi yang mereka terapkan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan perbandingan antar negara di kawasan ASEAN atau bahkan di luar ASEAN sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa. Penelitian lebih lanjut dapat menganalisis dampak jangka panjang dari penerapan akuntansi hijau terhadap kinerja perusahaan, baik dari segi finansial maupun sosial. Hal ini akan memberikan bukti yang lebih kuat mengenai manfaat yang didapatkan perusahaan dalam menerapkan akuntansi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dhaimesh, O.H. (2020), Green accounting practices and economic value added: An applied study on companies listed on the Qatar stock exchange. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 164-168
- Ashari, M., Anggoro, Y. (2021), Mewujudkan keberhasilan usaha dengan penerapan Akuntansi Hijau. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen*, 5(1), 45-56.
- Aulia, Azwani (2023) Trend Analysis of ESG Disclosure on Green Finance Performance In Indonesia, Malaysia & Singapore Exchanges. *Jurnal Akuntansi*, Vol 10 No. 1, Januari 2023.
- Bambang, A. & Hadi, S. (2022). "The Impact of Green Accounting on Sustainable Business Practices: A Case Study in Indonesia." *Journal of Business and Environmental Studies*, Vol. 14.
- Chairia, Chairia., Jenni, Veronika, Br, Ginting., Polin, Ramles., Felix, Ginting. (2022). Implementasi green accounting (akuntansi lingkungan) di indonesia: studi literatur. *Financial: Jurnal Akuntansi*, doi: 10.37403/financial.v8i1.368
- Darlis, Edfan; et.al. (2024). Green Accounting, Corporate Governance and Firm Value in Southeast Asia Region. *Journal of Accounting Research, Organization, and Economics Vol. 7 (1), 2024: 15-32.*
- ENDIANA, I Dewa Made, DICRIYANI, Ni Luh Gd Mahayu, ADIYADNYA Md Santana Putra, PUTRA, I Putu Mega Juli Semara. (2020). The Effect of Green Accounting on Corporate Sustainability and Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 12 (2020) 731-738.*
- Feng, X. (2024). Green Accounting in China: Challenges, Opportunities, and the Path Forward. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 86(1), 1-7. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/86/20240929>
- Hamidi. (2019). Analysis of the Implementation of Green Accounting on Company Financial Performance. *Equilibria*, 6(2), 23-36
- Indriastuti, Maya & Riansyah, Andi. (2024). Sustainable Performance: Evidence of SMEs in Indonesia. *The Asian Journal of Business and Accounting: 17 (1): 293-315. DOI: https://doi.org/10.22452/ajba.vol17no1.10*
- Lako, A. (2018). *Green Accounting Issues, Theory and Applications*. Jakarta: Salemba Empat

- Maya, Aresteria., Deddy, Sulestiyono., Yunita, Lisnaningtyas, Utami. (2024). Regulation and corporate environment social governance score in indonesia. *Proceeding of The International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, doi: 10.34010/icobest.v7i.603.
- May Hana Bilqis Rangkuti, Fauziah Kumalasari. (2023). Green accounting in enhancing sustainability report disclosure. *International Journal of Research and Review: 10(11): 483-489. DOI: <https://doi.org/10.52403/ijrr.20231156>*
- Meilda Wiguna, Sri Indarti, Thamrin and Andreas (2023). Determinants of sustainable development: The role of CSR disclosure. *Problems and Perspectives in Management, 21(2), 210-220. doi:10.21511/ppm.21(2).2023.23*
- Sari, R. & Hasan, A. (2020). "The Role of Green Accounting in Corporate Sustainability: Evidence from Indonesia." *International Journal of Accounting and Financial Reporting*.
- Sebastian, M. (2022), A study on green accounting: Concept and its importance. *Internal Journal of Creative Research Thoughts, 10(8), 677-681*
- Sembiring, Sabrina Dwisanta Br., Syarifah Fachira Nabilla, Deliana Deliana Sania Roidhatun Nisa. (2023). Implementation of Green Accounting on Company Performance. *Simposium Ilmiah Akuntansi 5*
- Setyawan, D. & Giyanto, M. (2019). "Perkembangan Akuntansi Hijau di Indonesia dan Tantangan yang Dihadapi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 16 No. 1.
- Sibuea, M. B., Sibuea, S. R., & Pratama, I. (2021). *The impact of renewable energy and economic development on environmental quality of asean countries. AgBioForum, 23(1), 12–21.*
- Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Yudianto, I., Lestari, T. U., & Ghani, E. K. (2023). Does Green Accounting Affect Firm Value? Evidence from ASEAN Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy, 13(2), 509–515. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14071>*
- Traxler, A.A., Schrack, D., Greiling, D. (2020). Sustainability reporting and management control-A systematic exploratory literature review. *Journal of Cleaner Production, 276, 122725.*
- Wagner, I., & Suteki, S. (2019). Independensi Penilaian Amdal Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 404–424. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424>*
- Wiratna, Sujarweni., Poly, Endrayanto, Eko, Christmawan. (2024). Green accounting practices in indonesian companies. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, doi: 10.31002/rak.v9i1.1425
- Yulyan, A. S., Ghofur, R. A., Devi, Y., & Audia, N. (2024). Analisis Pengaruh Environment Cost Disclosure (ECD) dan Indonesian Environment Reporting (IER) terhadap Sustainability Reporting (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2020-2022). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS), 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i1.7580>*
- Yusoff, H., Kamaruddin, S.H., Ghani, E.K. (2018). Environmental reporting practices of top listed companies: Analysing precorporate social responsibility framework. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 2(1), 50-64.*